



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN HADIANA
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 704281

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 894.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KAB / KOTA
PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/980 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, WARISAN Rp. 294.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 35.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B6H-L A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 173.414.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 170.620.353

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 1.373.034.353

III. HUTANG Rp. 19.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.353.534.353

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.